

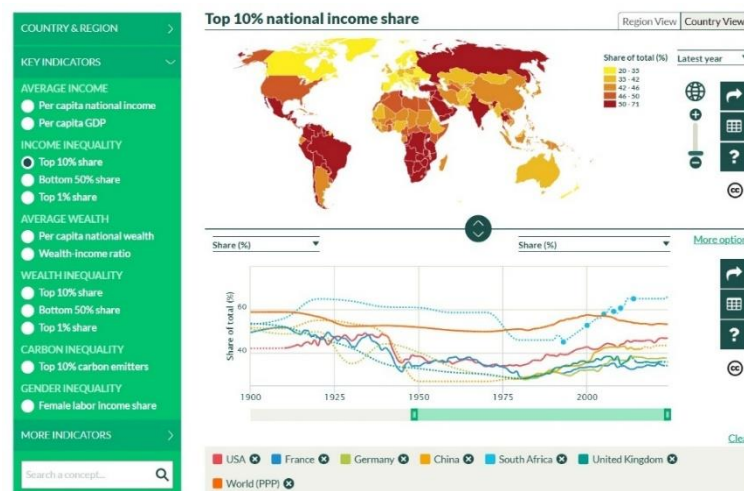
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja, namun, pertumbuhan yang tinggi tidak selalu disertai dengan pemerataan manfaat. Situasi ini menimbulkan masalah ketika beberapa kelompok atau daerah merasakan peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga kesenjangan pendapatan tetap ada atau bahkan bertambah. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan menjadi isu penting dalam penilaian kualitas pembangunan karena menunjukkan seberapa jauh hasil pembangunan didistribusikan secara berkeadilan (Asy'ariati *et al.*, 2022).

Gambar 1.1 *Income Inequality National*



Sumber: World Inequality Database (WID, 2026)

Data *World Inequality Database* (WID, 2026) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan global masih tinggi, dimana 10% kelompok terkaya di banyak negara menguasai lebih dari 40-50% pendapatan nasional, bahkan melebihi

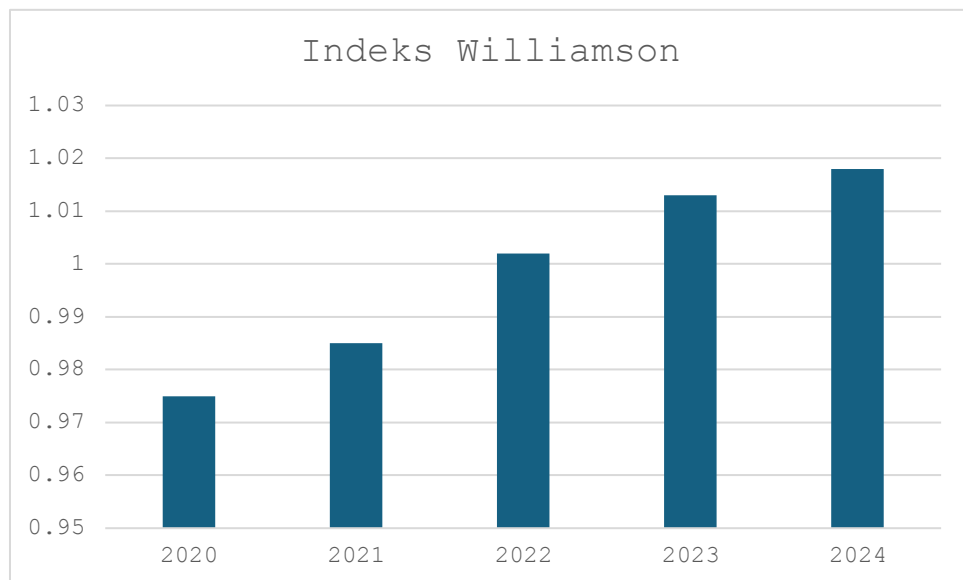
60% di beberapa negara. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan manfaat pembangunan. Tantangan serupa juga dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih berjuang mengatasi ketimpangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah serta masalah kemiskinan yang belum terselesaikan (S. Dai, Canon dan Bauty, 2023).

Pada tingkat individu, perbedaan pendapatan berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Perbedaan pendapatan yang tinggi berkaitan dengan berbagai dampak sosial negatif, seperti masalah Kesehatan, meningkatnya kriminalitas, serta menurunnya kepercayaan sosial dan persepsi terhadap keadilan (Koponen dan Kouvo, 2024). Oleh karena itu, ketimpangan tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga persoalan ekonomi yang perlu diukur secara tepat. Dalam konteks analisis regional, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antardaerah adalah Indeks Williamson, yang menghitung kesenjangan PDRB per kapita dengan memperhitungkan jumlah penduduk (Aprilianti dan Harken, 2021). Indeks Williamson dinilai relevan untuk menggambarkan variasi dalam tingkat pendapatan di berbagai wilayah dalam satu provinsi, sehingga sesuai dengan penelitian ini terkait dengan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.

Ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diukur dengan Indeks Williamson, menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup signifikan. Selama periode 2020 hingga 2024, nilai Indeks Williamson meningkat dari 0,975 menjadi 1,018. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi serta pendapatan per kapita cenderung terkonsentrasi di area tertentu saja. Temuan

deskriptif ini menegaskan pentingnya melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.2 Indeks Williamson



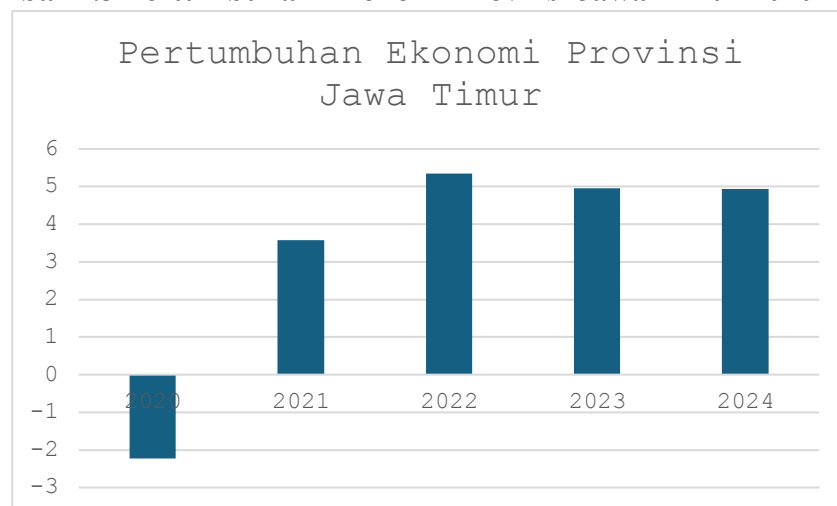
Sumber: Penulis

Berdasarkan fenomena ketimpangan pendapatan yang telah dijelaskan, perbedaan antara wilayah adalah fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai alasan ekonomi dan struktural. Beragamnya karakteristik wilayah, kapasitas ekonomi masing-masing daerah, serta distribusi hasil Pembangunan yang tidak seimbang membuat taraf kesejahteraan antar daerah menjadi tidak merata (Saputri dan Arif, 2023). Dalam kerangka pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi fokus utama karena meskipun pertumbuhan yang tinggi sering dianggap sebagai tanda keberhasilan pembangunan, keadaan ini tidak selalu diiringi dengan distribusi pendapatan yang adil (Widyastuti dan Indrawati, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai

langkah awal untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi tidak selalu disertai dengan pemerataan pendapatan (Wahyuni dan Andriyani, 2022). Model pembangunan yang terlalu menekankan percepatan pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan, karena hasil dari pembangunan cenderung terfokus pada kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi serta daerah yang telah berkembang secara ekonomi juga menjelaskan pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan sering kali menyebabkan masalah baru, seperti kemiskinan dan ketimpangan, ketika *trickle-down effect* tidak berfungsi dengan baik (Amalia *et al.*, 2022). Ketimpangan pembangunan dapat menyebabkan daerah-daerah yang sudah maju tumbuh semakin pesat, sementara daerah-daerah yang terbelakang semakin tertinggal.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2020-2024



Sumber: (BPS, 2025) (data diolah)

Perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024 menunjukkan pola pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -2,4 persen akibat COVID-19, kemudian berangsur pulih pada 2021 sebesar 3,6 persen dan meningkat signifikan pada 2022 sebesar 5,3 persen. Meskipun sedikit melambat pada 2023-2024, pertumbuhan tetap stabil di kisaran 5 persen. Kondisi ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup baik, namun pertumbuhan tersebut belum tentu disertai pemerataan pendapatan antar wilayah.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja daerah oleh pemerintah daerah juga dapat berdampak pada distribusi pendapatan. Melalui penerapan kebijakan fiskal setempat untuk menyalurkan belanja daerah guna membiayai sarana dan prasarana serta layanan publik yang esensial untuk menaikkan kualitas hidup penduduk (Negara dan Khoirunurrofik, 2021). Akan tetapi, ketimpangan dalam kemampuan fiskal serta fokus pembangunan antarwilayah administratif bisa memicu ketimpangan dalam pengeluaran, yang dampaknya adalah manfaat pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang maju dan berpotensi memperlebar ketimpangan (Febrianto, 2017). Selain itu, efektivitas pengeluaran pemerintah daerah juga berkaitan dengan peningkatan modal manusia, yang sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Muhamad dan Rahmi, 2023).

Dalam hubungannya dengan ketimpangan pendapatan, perbedaan dalam IPM antara wilayah bisa menyebabkan kesenjangan kesejahteraan. Daerah-daerah dengan IPM yang lebih tinggi umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih berkualitas, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah dengan IPM yang lebih rendah,

kesenjangan ini berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan (Irawan, Wijimulawiani dan Hak, 2024). Namun, peningkatan IPM tidak selalu disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan secara otomatis apabila tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja dan akses ekonomi yang merata. Oleh karena itu, IPM merupakan variabel penting untuk diteliti dalam menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan di antara Kabupaten/Kota (Febrianto, 2017).

Selain kualitas sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh pendapatan tenaga kerja, salah satunya melalui kebijakan upah minimum (Fitriani *et al.*, 2022). Upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak dan meningkatkan daya beli, sehingga berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan (Putri dan Hanifa, 2024). Namun, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu searah. Jika kenaikan upah minimum lebih banyak dinikmati pekerja sektor formal dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sektor informal tidak terjangkau, maka ketimpangan antarwilayah justru dapat meningkat (Putri dan Hanifa, 2024). Di Provinsi Jawa Timur, perbedaan tingkat upah minimum antar Kabupaten dan Kota mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan di antara daerah, terutama jika tidak disertai dengan pemerataan kesempatan kerja dan perkembangan sektor produktif di area yang kurang maju (Utomo, 2021).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terlihat bahwa perhatian terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia masih banyak berfokus pada tingkat nasional dengan menggunakan Indeks Gini yang menggambarkan ketimpangan antarindividu. Namun, kondisi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pentingnya

analisis yang menekankan ketimpangan antarwilayah, mengingat adanya perbedaan dalam kekuatan ekonomi, pusat kegiatan industri, serta kualitas pembangunan antara Kabupaten/Kota. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, serta standar upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris yang lebih spesifik untuk Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Indeks Williamson sebagai indikator ketimpangan regional.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain; cakupan penelitian terbatas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Indeks Williamson, variabel yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum, serta data yang digunakan terdiri dari data sekunder resmi dari Lembaga-lembaga terkait untuk periode 2020-2024, dan penelitian ini tidak mengulas faktor lain di luar variabel yang sudah disebutkan, semisal struktur industri, investasi pihak swasta, laju urbanisasi, atau pergerakan penduduk, yang bisa jadi berpengaruh pada kesenjangan pendapatan.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang yang telah dijelaskan diatas, isu utama dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan di antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, meskipun wilayah tersebut terus mengalami perkembangan ekonomi. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi, kapasitas belanja pemerintah daerah, kualitas pembangunan manusia, dan kebijakan upah diyakini turut berkontribusi terhadap ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan dibahas dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis apakah belanja daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Menganalisis apakah upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup rumusan masalah, subjek penelitian, serta data dan variabel yang dianalisis, guna menjaga agar pembahasan tetap berfokus pada tujuan penelitian. Penelitian ini terbatas pada ketimpangan pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder resmi.

Fokus penelitian ini adalah hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan daerah. Variabel yang diamati meliputi pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum sebagai faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor di luar variabel-variabel tersebut, sehingga temuan difokuskan pada pengaruh dari variabel pembangunan ekonomi dan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terkait ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih adil dan inklusif.

2. Bagi Perencana Pembangunan dan Pembuat Kebijakan

Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menjadi landasan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

3. Bagi Pemangku Kepentingan yang Terkait dengan Pembangunan Daerah

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memahami kondisi ketimpangan pendapatan serta mendukung upaya koordinasi antardaerah dalam implementasi pembangunan ekonomi yang inklusif di Provinsi Jawa Timur.